

PERAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) DALAM MENCEGAH RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA PADA TAHUN 2018

Nabila Fauziah Gardita - 14010115140065

garditan@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Dr. Drs. Muhammad Adnan, MA.**

adonan.sensei@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Radikalisme agama adalah sebuah fenomena yang menjadi persoalan global, dianggap sebagai pemicu aksi terorisme yang mengganggu keamanan dan kedamaian di mana-mana. Radikalisme agama tidak terjadi hanya pada agama tertentu saja tapi semua agama besar di dunia mengalaminya. Dan dalam konteks keindonesiaan, gerakan radikalisme Agama sangat identik dengan agama Islam sebagai agama mayoritas.. Para oknum ini sering kali memberikan pernyataan kepada publik atau pengikutnya bahwa Islam di Indonesia sedang dijajah, adanya gerakan liberal dan sekularisme, sehingga mereka mencita-citakan terlaksananya syariat Islam dalam kehidupan sosial politik. Dan untuk mencapai cita-cita itu dilakukan tindak-tanduk kekerasan yang drastis. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat berbasis Islam terbesar di Indonesia menjadi salah satu target kelompok radikal ini. Dimana NU menghadapi permusuhan dan serangan dari pihak-pihak ini. Gelombang fitnah yang dilakukan secara terorganisir, sistematis dan meluas ini mengarah kepada semua aspek ke-NU-an.

Penelitian ini mengambil fokus kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai salah satu *Civil Society Organization* (CSO). Pembahasan pada penelitian ini berusaha mengungkapkan seberapa besar peranan PBNU terhadap upaya mencegah radikalisme di Indonesia pada tahun 2018 dan faktor yang menjadi penguat peranan PBNU dalam isu radikalisme ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dapat berupa kata-kata, gambar, kutipan-kutipan hasil wawancara mendalam, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PBNU bersama dengan neven-neven memiliki peran yang besar dalam upaya mencegah radikalisme di Indonesia pada tahun 2018 melalui berbagai program yang telah dilaksanakan. Peranan ini terbagi menjadi 4 (empat), yaitu 1) Pemikiran, dengan cara penguatan prinsip *Ahlissunnah waljamaah an-Nahdliyyah*; 2) Administratif, dengan cara memberikan berbagai insruksi yang terstruktur dan sistematis dari pusat ke daerah; 3) Gerakan, dengan cara melakukan berbagai kegiatan pelatihan, program-program lembaga, dan kaderisasi; dan 4) Merespon Keadaan, dengan cara memberi pernyataan sikap, komentar, kritik, dan saran. Adapun Faktor yang menguatkan peran NU dalam mencegah radikalisme adalah nilai-nilai *Ahlisunnah Wal Jamaah*, khazanah tradisi Budaya warga Nahdliyyin, peran ulama NU dalam menyampaikan pendamaian antara nilai keagamaan dengan kebangsaan, lembaga pendidikan pesantren, sekolah formal berbasis NU, tasawuf dan thoriqoh, massa dan jejaring NU, dan Akses kepada Pemerintah.

KATA KUNCI

Radikalisme Agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Ahlisunnah Wal Jamaah.

Pendahuluan

Radikalisme agama adalah sebuah fenomena yang menjadi persoalan global, dianggap sebagai pemicu aksi terorisme yang mengganggu keamanan dan kedamaian di mana-mana. Radikalisme agama tidak terjadi hanya pada agama tertentu saja tapi semua agama besar di dunia mengalaminya. Dewasa ini banyak terjadi kekacauan-kekacauan disekitar kita yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok kecil hingga kelompok besar. Ada pihak-pihak tertentu yang menyalahartikan terhadap ajaran dalam suatu agama, seperti memahami sesuatu secara tekstual saja, memahami sesuatu secara berlebihan atau bahkan membenarkan sesuatu yang menurutnya benar. Inilah yang sering kita sebut dengan pemahaman yang radikal.

Gerakan radikalisme agama di Indonesia sangat identik dengan agama Islam sebagai agama mayoritas. Para oknum ini sering kali memberikan pernyataan kepada publik atau pengikutnya bahwa Islam di Indonesia sedang dijajah, adanya gerakan liberal dan sekularisme, sehingga mereka menginginkan dilakukannya perubahan sosial politik sesuai dengan syariat Islam dan mencita-citakan terlaksananya syariat Islam dalam kehidupan sosial politik. Dan untuk mencapai cita-cita itu dilakukan tindak-tanduk kekerasan yang drastis. Radikal disini tidak akan berbahaya jika masih hanya sebatas pemikiran ataupun pendapat. Tetapi ketika radikal sudah meningkat menjadi perilaku dan perbuatan, dari sinilah akan muncul tindakan-tindakan yang bisa merugikan banyak pihak, seperti klaim kebenaran, pengkafiran terhadap orang lain, gerakan merubah konstitusi negara, hingga aksi bom nuklir.

Banyak penelitian dan hasil survey yang menunjukkan bahwa radikalisme di Indonesia sudah tergolong tinggi. Beberapa kasus di tahun 2018 yang menjadi tindakan radikal seperti kasus mahasiswa di Riau yang memiliki pemikiran radikal sampai dengan membuat Bom rakitan, hasil survey dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menemukan dari 100 masjid terdapat 41 masjid yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme.

Serangan yang dilakukan oleh kelompok radikal kepada NU ini merupakan puncak dari upaya yang telah lama untuk melemahkan, mengalahkan, dan menghilangkan NU. Serangan dari berbagai pihak ini menggunakan berbagai metode dan strategi mulai dari yang lembut dan persuasif, memaksa dengan menggunakan otoritas politik (mempeengaruhi perda-perda, hingga Undang-Undang), istilahnya soft and indirect corection, hingga menggunakan pemaksaan dengan kekerasan, senjata, dan bahkan teror, istilahnya direct coercion. Maka, dengan melihat fakta massivenya gerakan kelompok radikal ini, NU tidak hanya diam dan semakin keras berupaya membenahi diri, melakukan konsolidasi kekuatan, memperluas khidmah dan pelayanan umat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa, tulisan ini membahas mengenai beberapa point. Pertama, peran yang dilakukan oleh PBNU dalam upaya mencegah menyebarnya paham-paham dan tindakan-tindakan radikalisme atas nama Agama di Indonesia tahun 2018. Kedua, faktor-faktor yang menguatkan peranan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya pencegahan menyebarnya paham-paham dan tindakan-tindakan radikalisme atas nama agama di Indonesia pada tahun 2018.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; *Civil Society* dan Radikalisme penjelasannya adalah sebagai berikut:

Civil Society

Konsep civil society sudah berkembang di negara-negara barat sejak abad ke 17. Konsepsi civil society muncul karena terjadi dominasi dan otoritarian dalam praktek kekuasaan oleh penguasa negara-negara barat saat itu. Konsep masyarakat sipil tertua ada sejak zaman Yunani kuno oleh filsuf Aristoteles. Menurutnya, masyarakat sipil atau politike koinonai adalah komunitas atau masyarakat politik atau negara dalam ajang ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Selain

Aristoteles, masyarakat sipil dipopulerkan oleh Marcus Tullius Cicero yang mengartikan masyarakat sipil sebagai *societas civilis* yakni komunitas masyarakat yang mendominasi kelompok atau komunitas lain.

Larry Diamond mendefinisikan *civil society* sebagai aktivitas sosial yang bersifat terbuka dengan prinsip, kerelaan, muncul dengan sendirinya, memiliki kemampuan swasembada, otonom dari Negara dan adanya ketaatan atas aturan internal. Lebih jauh Larry Diamond menegaskan bahwa *civil society* diwujudkan dalam banyak bentuk organisasi, termasuk organisasi kultural yang terdiri dari agama, etnik, kelompok atau organisasi dan asosiasi yang mempertahankan kebenaran bersama, nilai, kepercayaan dan simbol.

Menurut Gellner, *Civil Society*, di samping merupakan sekelompok institusi/lembaga dan asosiasi yang cukup kuat mencegah tirani politik baik oleh negara maupun komunal/komunitas, juga cirinya yang menonjol ialah adanya kebebasan individu di dalamnya, dimana sebagai sebuah asosiasi dan institusi, ia dapat dimasuki serta ditinggalkan oleh individu dengan bebas. Lebih lanjut Gellner menyatakan bahwa *Civil Society* tidak hanya menolak dominasi negara atas dirinya, tetapi juga karena sebagai institusi yang bersifat non-state, maka dalam penampilan kelembagaannya tidak mendominasi individu-individu dalam dirinya.

1. Karakteristik Civil Society

Rosyada (2005) berpendapat *Civil society* memiliki karakteristik yang selalu melekat, mengikat, dan bertautan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa karakteristik yang muncul pada *civil society* antara lain :

- 1) Wilayah publik yang bebas (*Free Public Sphere*)
- 2) Demokratis
- 3) Toleran
- 4) Kemajemukan
- 5) Keadilan Sosial

Ciri lembaga yang merupakan bagian dari masyarakat sipil atau *civil society* pertama adalah independen. Selain independen, mereka juga mengaktualisasikan diri pada ruang publik, memberi informasi serta mengoreksi struktur dan kebijakan serta perilaku negara dan pasar. Kedua, lembaga bagian dari masyarakat sipil adalah lembaga non profit yang artinya tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba (Patra M.Zein dalam Kurniawan, 2008:2).

2. Prinsip Civil Society

Eisenstadt dalam Afan Gaffar (2000: 180) *Civil Society* menerangkan bahwa *civil society* merupakan sebuah masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang memiliki komponen tertentu sebagai syarat adanya *civil society*. Empat komponen sebagai syarat tersebut antara lain:

- 1) Otonomi
- 2) Akses masyarakat terhadap lembaga negara
- 3) Area publik yang otonom
- 4) Area publik yang terbuka bagi seluruh lapangan masyarakat

Radikalisme

Menurut Afif Muhammad (2016) radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar, dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau 'hingga ke akar-akarnya'. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah 'pemikiran yang radikal' dan bisa pula 'gerakan'. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik.

Dalam rangka mengembangkan radikalisme, Islam radikal memiliki ciri-ciri utama yang menggambarkan corak keIslamannya. Ciri ini merujuk pada cara mereka dalam menghadapi

perkembangan zaman yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid dalam *Islamic Fundamentalism, A Southeast Asia Perspective* memiliki gambaran bahwa kemunculan fundamentalisme atau radikalisme Islam diawali oleh ketidakmampuan sebagian muslim dalam mengintegrasikan sistem pendidikan, struktur keluarga, usaha ekonomi, dan aspirasi politik Islam ke dalam kehidupan berbangsa modern. Ketidaksetujuan dan ketidakpuasan yang disebabkan oleh kegagalan mereka yang mengintegrasikan diri ini menempatkan mereka sebagai pihak yang kalah, yang mereka pahami sebagai hilangnya dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya, sikap fundamentalis atau radikal menjadi jalan pelarian untuk mendapatkan kembali “dengan cara dalam” atas kekalahan yang dialami pada “sisi luar”.

1. Kerangka Pemikiran Islam Radikal

Menurut Syaiful Arif (2018:174) terdapat 4 hal yang menjadi kerangka pemikiran Islam radikal dalam melakukan gerakan:

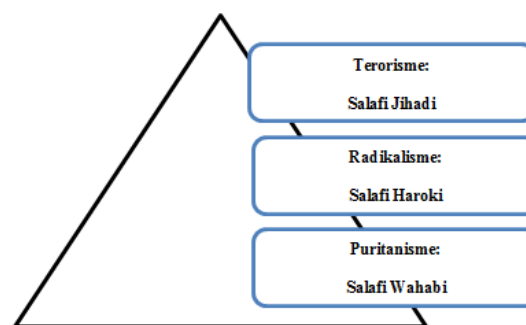
- (1) Menolak pemerintahan nasional
- (2) Menolak paham ke-Islaman mainstream (ortodoks) di sebuah negeri
- (3) Menolak ideologi politik nasional
- (4) Menolak partisipasi politik mayoritas Muslim dalam sistem demokrasi.

Sedangkan menurut Khammi Zada (2002:11) terdapat 5 hal yang menjadi kerangka pemikiran Islam radikal dalam melakukan gerakan

- (1) Islam harus menjadi dasar negara
- (2) Syariat harus diterima sebagai konstitusi negara
- (3) Kedaulatan politik ada di tangan Tuhan
- (4) Gagasan tentang negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan
- (5) Prinsip syura (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi

2. Tingkatan radikalisme

Bagan 1 Piramida Radikalisme



Sumber: buku *“Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi*

Pada level terbawah, radikalisme Islam didasari oleh sikap beragama puritan” memurnikan agama dari produk dan praktik kebudayaan. Sikap ini lahir dari pembenturan antara agama dan budaya, sebab agama dianggap murni aturan Tuhan yang tidak boleh dinodai oleh budaya. Sebagai sikap dasar, puritanisme merupakan sifat umum dari semua corak radikalisme Islam, meskipun gerakan puritan spesifik, yakni kaum salafi wahabi tidak berpolitik sebagaimana salafi jihadi. Lalu, di atas Puritanisme agama terdapat radikalisme, yang digerakkan oleh kaum salafi haroki. Disebut radikal karena ia ingin menciptakan perubahan masyarakat secara menyeluruh berbasis ideologi Islam, melalui gerakan (haroki) ujung dari perjuangan radikalisme ialah pengantian sistem politik modern dengan sistem politik Islam, baik dalam bentuk khilafah Islamiyyah global maupun daulah Islamiyyah berskala nasional. Yang dimaksud dengan radikalisme Islam ini merujuk pada gerakan salafi haroki yang berpolitik, yang merupakan varian Islamisme terdidik dari kelas menengah kaum

Islamis. Selain berpolitik, kaum radikal bersifat puritan seperti salafi wahabi meski tidak selalu terlibat dalam terorisme. Sedangkan puncak dari radikalisme Islam ialah terorisme yang menggunakan pendekatan militer demi penegakan khilafah untuk meruntuhkan hegemoni barat (AS dan Israel). Ia lahir dari medan perang Afghanistan melawan Uni Soviet pada 1979, dan semakin mengental paska pengeboman gedung WTC AS pada tahun 2001. Salafi jihadi adalah kaum radikal yang menggerakkan jihad bermakna perang melawan pemerintahan barat dan pemerintahan muslim yang tidak mendirikan negara Islam. Pandangan budayanya puritan, karena sebagian kaum jihadi juga merupakan kaum wahabi, serta ingin mendirikan sistem politik Islam sebagaimana salafi haroki (Arif, 2018:180).

Peran PBNU Dalam Mencegah Radikalisme Agama Di Indonesia Pada Tahun 2018

Pengurus Besar Nahdlatul ualam memiliki peran yang penting dalam upaya mencegah radikalisme agama di Indoensia dalam hal ini peneliti memfokuskan peran PBNU tersebut pada tahun 2018. Dalam menjalankan peran ini PBNU bersama dengan lembaga-lembaga dan badan otonomnya bergerak bersama dalam beberapa peran.

1) Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Nevennya dalam Pemikiran

Dalam menjalankan perannya untuk mencegah radikalisme agama di Indoneisa, PBNU memiliki pemikiran-pemikiran yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap, bertindak, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pemikiran-pemikiran ini dirumuskan oleh PBNU melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

- a. Melalui Keputusan-keputusan. PBNU membuat beberapa keputusan-keputusan. Dalam hal ini dalam kegiatan Mukhtar NU yang selalu dilakukan satu kali dalam setiap periode. Dan pada periode KH. Said Aqil memberikan keputusan terakrit nalisis Ekstrenal NU dalam pertama, kehidupan beragama dan berbangsa yang meakukan penggolongan kelompok radikal yang ada di Indonesia menajdi 4 golongan berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada kelompk salafi, Jihadi, Takfiri dan Siyasi. Kedua, Gerakan Lintas-Batas Negara, Hakekatnya kelompok ini adalah gerakan sempalan (splinter group) yang lepas dan terpisah dari arus umat (mainstream/aamatul ummah). Ketiga, Meningkatkan Propaganda Anti Aswaja dengan fitnah-fitanh.
- b. Memlalui Munas dan Konferensi Besar.
- c. Melalui Halaqaoh. Dalam tradisi budaya NU Halaqoh adalah sebuah aktivitas khusus bila berkaitan dengan momen tertentu yang melakukan pembahasan tertentu terhadap masalah-masalah yang dianggap penting untuk di diskusikan.

2) Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Nevennya dalam Administratif

Dalam menjalankan perannya untuk mencegah radikalisme agama di Indoneisa, PBNU memiliki peran administratif yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap, bertindak, dan mencari solusi dari permasalahan secara terstruktur dan sistematis yang diberiiikan dari pusat hingga ke bawah. Peran Administrasi yang dilakukan oleh PBNU melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut: pertama, memlalui Instruksi yang diilakukan PP mUslimat dalam memberi Instruksi pada Muslimat wilayah unuk memasukan materi anti radikalisme dan erorisme di pengajian ibu-ibu. Kedua, Instruksi PBNU kepada lembaga pendidikan berbasis NU untuk meningkatkan daya kritis siswa dalam mengunkan teknologi informasi dan komunikasi.

3) Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Nevennya Melalui Gerakan

Dalam menjalankan perannya untuk mencegah radikalisme agama di Indoneisa, PBNU memiliki gerakan-gerakan yang sistematis dan terstruktur. Dengan membuat pergerakan yang diagendakan dan berkelanjutan. Gerakan ini dirumuskan oleh PBNU melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut: pertama, melalui kaderisasi kepada kader struktural maupun kultur NU.

Seperti kegiatan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama PBNU, Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK), Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Muharrrik Masjid dan Dakwah, dan Pendidikan Kader Dai. kedua, Melalui Pelatihan, seperti Training of Trainer Muharrrik Masjid dan Dakwah, Pelatihan dan FGD Kyai Muda; dan ketiga, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan badan otonom NU seperti GP Ansor mengadakan kegiatan Kurab satu Negeri dalam upaya mempersatukan umat. Gerakan yang dilakukan oleh Fatayat NU melalui berbagai kegiatan internasional Young Moslem Women Forum Fatayat NU, kolaborasi Program Bidang Advokasi Dan Bidang Dakwah “Perempuan Agen Perdamaian, Bersama Perangi Radikalisme Dan Terorisme”, dan drafting Modul Panduan Penguatan Dakwah Islam Rahmatan Lil ‘Aalami-in Bagi Daiyah. Lalu gerakan yang dilakukan oleh Muslimat NU dalam mencegah radikalisme melalui pengajian rutin, dan pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir adalah gerakan yang dilakukan oleh NU Online dalam menyampaikan pemikiran-pemikirannya kepada publik melalui berbagai tulisan, artikel, dan video dengan dua cara, yaitu memproduksi konten yang bisa membuat orang tidak mudah terkena virus radikalisme. Konten yang sifatnya alternatif-naratif. Damai, toleran, seperti nilai NU yang tawazun, tasamuh, taawun. Dan memproduksi konten yang tujuan untuk countering atau menchallenge gagasan yang radikal dalam berbagai konteks, misal politik, sosial-budaya. Menchallenge gagasan khilafah dan takfiri.

4) Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Nevennya dalam Merespon Keadaan

Pertama, Kritik Terbuka Ketua PBNU Pada BAN-PT. Kedua, PBNU Mendukung Lahirnya Undang-Undang Anti Terorisme yang lebih Tajam. Dan respon yang dilakukan oleh PBNU dalam mencegah radikalisme adalah respon PP muslimat terhadap aksi Bim di Surabaya dan PBNU merespon dengan bergerak ke 41 masjid-masjid yang terpapar radikalisme serta memperkokoh masjid yang tidak terkena radikalisme agar tetap dengan prinsipnya.

Faktor –faktor yang Memperkuat Peran PBNU Dalam Mencegah Radikalisme Agama di Indonesia Pada Tahun 2018

Nahdlatul Ulama memiliki peran besar dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa NU lahir akibat sebagai bentuk penolakan terhadap gerakan radikalisme kerajaan Arab Saudi yang akan melakukan penyamarataan madzhab. penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan kaum sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantikannya dengan model wahabi. Bahkan santer terdengar berita makam Nabi Muhammad Saw. Pun berencana digusur. Sejarah panjang kiprah NU sejak tahun 1926 sampai saat ini pun, tentu sangat berpengaruh besar pada cara pandang NU dalam memandang masalah agama dan kebangsaan. PBNU dalam menjalankan perannya sebagai ormas keagamaan yang konsern dalam upaya pencegahan radikalisme, terdapat beberapa faktor yang memperkuat posisi tersebut:

- 1) Kuatnya pemahaman warga Nahdliyyin terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak awal didirikannya NU oleh KH. Mohammad Hasyim Asy'ari sampai saat ini dipimpin secara struktural oleh KH. Said Aqil Siraj selaku Ketua umum PBNU memiliki asas Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-nahdliyyah. Dalam pandangan NU Aswaja An-Nahdliyah dimaknai dengan paham-paham dasar keagamaan NU yang pertama, mendasakan paham keagamanya kepada sumber-sumber Al-Quran, As-Sunnah, Isma' dan qiyas. Kedua, NU menggunakan jalan pendekatan Madzhab dibidang aqidah mengikuti ahlussunnah wal ajamaah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dibidang fiqh mengikuti salahsatu dari madzhab yang empat, dan di bidang tashawwuf mengikuti madzhab Imam Bahgdadi, Imam Ghazali, dan imam-imam lainnya. Dalam pemahaman NU, paham keagamaan Islam yang diyakini baik adalah yang memiliki karakter pemikiran/fiqroh ijtimaiyyah yang terumuskan dalam Khittah Nahdliyyah berisi pemaparan mengenai karakter menjauhi ekstrim (*tathorruf*), tidak berlebih-lebihan (*ghuluw*), dan tidak menyulitka-sulitkan

(*tasyaddud*) dalam bersikap dan menghadapi realitas kehidupan. Dalam berdakwah karakter ini penting sebagai perwujudan perintah “*ud’u ila sabili robbika bil hikmah wa mauidlotil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan*” karakter tersebut meliputi tawasstuh, i’tidal, tawazun, dan tasamuh, yang merupakan karakter dari umat Islam sendiri.

- 2) Kuatnya khazanah tradisi budaya warga Nahdliyyah. Kekuatan kultur menjadi kekuatan tersendiri dalam jamiyyah NU. Tidak seperti organisasi lain yang bertopang kepada struktur organisasi, NU justru ditopang dengan kekuatan kultur anggotanya yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Struktur dan kultur saling melengkapi sehingga menjadikan NU kuat dan mengakar sampai ke bawah. Oleh karenanya ia menilai diperlukan formula untuk menemukan hubungan antara kekuatan kultural (jamaah) dan struktural (Jam’iyyah) dalam NU.
- 3) Kuatnya peran Ulama NU dalam menyampikan pendamaian anantara nilai keagamaan dengan nilai kebangsaan. Kemampuan para ulama ulama-ulama yang ada di inonesia, khususnya Ulama NU mendamkan antara keIslaman dan kebangsaan. Dimana dalam konteks keberagaman dan kebangsaan tidak lagi dipertentangkan. Dan ajaran atau semangat kebangsaan yang dimiliki NU adalah dengan ajarannya Kiai Hasyim Asya’ari yang mengatakan mengatakan bahwa “Hubbul Watan Minal Iman”, yang dapat diartikan bahwa nasionalisme adalah bagian dari iman, Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan dan sebaliknya Anda beriman pada Tuhan harus nasionalis. Menjadi orang Islam yang baik pada bersamaan bisa menjadi orang Indonesia yang baik dan sebaliknya Menjadi orang Indonesia yang baik pada saat yang bersamaan bisa menjadi orang Islam yang baik.
- 4) NU memiliki lembaga pendidikan pesantren dan Sekolah formal dari jenjang MI sampai dengan perguruan tinggi. PBNU memiliki lembaga Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan dan pengajaran formal dan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah, disingkat RMI, melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan pondok pesantren. Yang hingga saat ini tercatat tidak kurang dari Jumlah pesantren bergaya tradisional tetap menduduki posisi paling atas di antara pesantren modern dan kombinasi tradisional-modern. Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU mencatat totalnya mencapai sekitar 21000 dari 24000 pesantren. Dan 12800 lembaga pendidikan yang tersebar diseluruh pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, hingga 24 perguruan tinggi.
- 5) NU memiliki kekuatan dalam ilmu tasawuf dan toriqoh yang menyebabkan ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memiliki sebuah badan otonom bernama Jam’iyah Ahli Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah, badan otonom yang membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang mu’tabar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jam’iyyah Ahli Thariqah Al Mu’tabarah NU merupakan suatu sarana bagi para Mursyidin/Khalifah, untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah berbaiat sekaligus sebagai forum untuk menjalin ukhuwah antar sesama penganut ajaran Thoriqoh dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan keihlasan didalam amaliyah ubudiyah serta meningkatkan rabithah terhadap guru Mursyid / Khalifah.
- 6) NU memiliki massa yang banyak berupa anggota NU yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia yang jumlahnya menginjak 80 juta jiwa sehingga NU memiliki jaringan yang banyak. Berdasarkan hasil survey dari exit poll Lembaga Pollser yang kredibel dan ternama di Indonesia, seperti LP3ES, Lembaga Survey Indonesia (LSI), Lingkaran Survey Indonesia dan Kompas pada pemilu 2009 lalu dengan sampel rata-rata 10000 sampel, dengan jangkauan nasional (nationwide) memperlihatkan data bahwa jumlah awarga NU berada pada rentang 42% dari total jumlah pemilih 170 juta, maka jumlah warga NU setara dengan kurang lebih 85 juta sementara jumlah warga Muhammadiyah berada pada rentang 9%, setara dengan 16 juta.
- 7) NU mampu mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Sebagai organisasi yang mempunyai pengalaman organisasi yang banyak berdampak langsung terhadap perkembangan dan kaderisasi yang lama, membuat massa anggota NU menjadi ormas dengan anggota terbesar di Indonesia. secara otomatis kondisi ini menyebabkan posisi kelembagaan NU

baik dari segi politik, budaya maupun agama, sangatlah kokoh. NU muncul sebagai pusat keseimbangan yang strategis, yang mampu menopang paham keagamaan Ahlul Sunnah wal Jamaah maupun paham kebangsaan dan kenegaraan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Adalah sangat wajar banyak kalangan strategis di level nasional maupun internasional menganggap NU sebagai *The Pillar Of The Nation*, pilar penyangga bangsa. Banyak tokoh-tokoh NU baik yang struktural dan kultural yang mampu menduduki posisi strategis di pemerintahan

Penutup

Kesimpulan

Dalam hasil muktamar NU pada tahun 2015, NU merumuskan bahwa ada kelompok radikal di Indonesia yang dapat dipetakan karakteristiknya menjadi beberapa kelompok, antara lain: 1) Kelompok Takfiri 2) Kelompok Jihadi. 3) Kelompok Siyasi, 4) Kelompok salafi. Melihat keberadaan kelompok-kelompok radikal di Indonesia, tentu Peran PBNU sebagai NGO dalam mencegah radikalisme ini sangatlah diperlukan. Adapun peranan PBNU di Indonesia pada tahun 2018 ini dilakukan dengan berbagai kegiatan dalam rangka memperkuat masyarakat melalui berbagai aktivitas seperti pendampingan, pembelaan, dan penyadaran. Kegiatan ini terbagi kedalam 4 peran, yaitu 1) Pemikiran, dengan cara penguatan prinsip Ahlul Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah; 2) Administratif, dengan cara memberikan berbagai insruksi yang terstruktur dan sistematis dari pusat ke daerah; 3) Gerakan, dengan cara melakukan berbagai kegiatan pelatihan, program-program lembaga, dan kaderisasi; dan 4) Merespon Keadaan, dengan cara memberi pernyataan sikap, komentar, kritik, dan saran. Dan dalam menjalankan perannya sebagai ormas keagamaan yang konsern dalam upaya pencegahan radikalisme, terdapat beberapa faktor yang menguatkan posisi PBNU tersebut, antara lain nilai-nilai Ahlul Sunnah Wal Jamaah, khazanah tradisi Budaya warga Nahdliyyin, peran ulama NU dalam menyampaikan perdamaian antara nilai keagamaan dengan kebangsaan, lembaga pendidikan pesantren, sekolah formal berbasis NU, tasawuf dan thoriqoh, massa dan jejaring NU, dan Akses kepada Pemerintah.

Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai peran PBNU dalam mencegah radikalisme. Penulis merasa bahwa PBNU Perlu melaksanakan program kerja NU dalam upaya pencegahan radikalisme yang lebih terbuka untuk umum, tidak sebatas bagi warga NU saja. Agar nilai-nilai Ahlul Sunnah wal Jamaah, Islam yang ramah, toleran, dan moderat dapat dimengerti oleh anak-anak muda, yang saat ini semangat keberagaman anak muda sedang meningkat. Agar tidak salah mendapatkan tempat belajar. Sehingga pemikiran/paham-paham bahkan tindakan radikalisme di Indonesia dapat dicegah. Sehingga, NU perlu melakukan pembenahan-pembenahan dalam strategi berdakwah. Bertahan dengan cara dakwah konvensional bisa jadi akan kian menjauhkan NU dari masyarakat yang sedang beranjak dari budaya lama. Keduanya adalah satu paket persoalan yang bisa menjadi pijakan untuk memprediksi nasib ajaran NU di masa mendatang. Jika NU saat ini belum mampu melakukan transformasi dakwah di era digital hal ini akan mengakibatkan dengan semakin menguatnya dakwah kelompok lain yang berseberangan melalui media-media digital yang lebih mudah diakses, seperti melalui Televisi, Radio, media sosial, aplikasi, info grafis, video grafis, dan website-website. Maka, NU perlu meningkatkan perannya dalam dakwah kreatif di era digital agar banyak tokoh-tokoh NU yang dapat menjadi idola bagi kaum-kaum muda dalam menjalankan semangat keberagamaannya.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Warga Nahdliyyin khususnya dan seluruh Masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pengurus Besar Nahdliyyin Ulama yang sudah berkontribusi penuh untuk turut menjaga perdamaian, keharmonisan, dan ketuhanan bangsa dan NKRI tercinta ini. Juga terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Arif, Syaiful. 2018. Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan. Jakarta: PT Gramedia.
- Arsam. 2013. NU (Nahdlatul Ulama) dan Wacana Radikalisme Agama: Analisis Terhadap Majalah Risalah Tahun 2011-2012. Purwokerto: Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto. hlm. 11.
- Chalik, Abdul. 2011. Nahdlatul Ulama dan Geopolitik: Perubahan Dan Kesenambunga. Yogyakarta: IMPULSE & Buku Pintar.
- Dja'far, Alamsyah. 2018. (In) Toleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama.
- Esty Ekawati. 2016. Nahdlatul Ulama (Nu) Sebagai Civil Society Di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hlm. 247.
- Feith, Herbert dan Lance Castles. 1988 (ed). Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES. hlm. 195. Pdf
- Gaffar, Afan. (2000). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikam, Muhammad. (1999). Demokrasi dan Civil Society. Jakarta : LP3ES.
- Jalaludin. 2011. Psikologi Agama. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hal.12. e-book.
- John W Creswell. 2016. Research Design edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Lutfi J dkk. 2008. Negara, Civil society, dan Demokratisasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan. Malang: In-TRANS Publishing.hlm.9-12.
- LTM PBNU. 2016. Pedoman Muharrik dan Ta'mir Masjid NU. Jakarta: PT. Toa Galva Prima Karya.
- Moleong, Lexy. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muzadi, Abdul Muchith. 2014. Antologi : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah NU. Surabaya: LTNU Jawa Timur.
- Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 28. Pdf.
- Rahmat, Imdadun. 2019. Mewaspada Para Penentag Aswaja: Panduan Kader Penggerak Masjid NU. Jakarta : LTM PBNU.
- Rosyada, Dede. (2005). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.
- Shidqi, Ahmad. 2012. Respon Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabisme Dan Implikasinya Bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam. Joyyakarta: Jurnal Pendidikan Islam STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta. Volume I, Nomor 2. Hlm 127.
- Siroj, Said Aqil. 2015. Meneguhkan Islam Nusantara. Jakarta: PT. Khairu Jalsin Kitabun.
- Siroj, Said Aqil. 2006. Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi. Jakarta: SAS Foundation.
- Sjadzali, Munawir. 1980. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press. hlm. 131.pdf.
- Subhan, Muhammad. 2007. Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah. Surabaya: Khalista.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto AS. 2013. Paradigma Nahdlatul 'Ulama Terhadap Modernisasi. Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.2., 2013, hlm 66
- Suryadi, Adi. 2006. Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia. Jakarta: LP3ES. hlm. 20-68.pdf
- Tim PWNU Jawa timur. 2007. Aswaja An-Nahdliyah. Surabaya: Khalista. Hlm.47-50.

- Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute. hlm. 88-89.
- Yahya, Iip. 2018. *NU Penjaga NKRI*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal : Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta : Teraju. hlm.11.pdf.
- Zudi, Setiawan. 2009. *Pemikiran dan Kebijakan Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Era Reformasi (1998-2009)*. Semarang: Jurnal Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Hlm. 80-83.

Daftar Informan

1. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020)
2. Dr. H. Rumadi Ahmad, MA (Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU periode 2015-2020)
3. KH. Abdul Manan Ghani (Penasehat Lembaga Takmir Masjid (LTM) PBNU periode 2015-2020)
4. Ali Sobirin (Wakil sekretaris Lembaga Takmir Masjid (LTM) PBNU periode 2015-2020)
5. H. Moch. Buchori Muslim, Lc, M.A. (Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU periode 2015-2020)
6. Savic Ali (Direktur NU Online periode 2015-2020)
7. Achmad Mukafi Niam (Redaktur NU Online 2015-2020)
8. Anggia Ermarini, MKM (Ketua PP Fatayat NU periode 2015-2020)
9. Adung Abdul Rahman (Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor periode 2015-2020)
10. Susianah Affandy M.Si. (Anggota Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang PP Muslimat NU periode 2016-2021)

Tentang Penulis

Nabila Fauziah Gardita adalah Mahasiswa S1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.